

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan intern berpengaruh dengan arah positif terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Peningkatan sistem pengawasan intern yang semakin baik maka akan dibarengi oleh pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik juga, Dengan kata lain sistem pengawasan intern akan turut meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan koefisien determinasi besarnya pengaruh sistem pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo adalah sebesar 31.2%.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif tentang sistem pengawasan intern diketahui bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan dengan baik, namun jika melihat masing-masing skor diketahui skor pada dimensi pengawasan fungsional memiliki nilai terendah sehingga itu dapat diberikan saran kepada Dikes Provinsi Gorontalo lebih meningkatkan lagi perhatiannya pada sistem

pengawasan fungsional terutama dalam penilaian pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Selain itu untuk pengelolaan keuangan daerah, meskipun dalam kategori baik, namun diharapkan lebih meningkatkan lagi pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan melakukan tata kelola yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien.

2. Bagi Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, diharapkan menambah variabel penelitian lainnya yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan, disarankan menambah variabel sistem akuntansi keuangan serta kinerja pegawai karena dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja pegawai yang memadai akan menghasilkan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aituarauw, Ade Indah Wahyuni Achmad. 2012. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Arikunto. Suharsimi. 2006. *Statistik Penelitian*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPF. Yogyakarta.
- Gunawan, Iman Rahmat. 2013. Pengaruh Pengawasan Intern Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey Pada Dinas Di Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Halim, Abdul & Muhammad Iqbal. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Haloho. 2012. Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Dinas-Dinas Di Kota Bandung).** *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Harto. Rudi. 2011. Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya).** *Jurnal*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Kurniawan, Teguh. 2004. Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan. [http://olp.uwp.ac.id/www/content/lessons/49/Otda\\_S2\\_23092007.pdf](http://olp.uwp.ac.id/www/content/lessons/49/Otda_S2_23092007.pdf)

- Kemenpan. 2004. *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Menteri pendayagunaan aparatur negara Nomor: kep/46/m.pan/4/2004
- Lan Ri. 1997. *pengertian pengawasan melekat (Waskat)*. sumber: <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/pengawasan-melekat.html>
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiana, Dina. 2011. Pengaruh Kinerja Pegawai Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey Pada Inspektorat Kota Bandung). *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nawawi. 1994. *Pengawasan Melekat*. Artikel Online <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/pengawasan-melekat.html>
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Renstra Dikes. 2010. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2010. Sumber: <http://akuproperty.files.wordpress.com/2008/01/renstra-gabung.pdf>.
- Renstra Dikes, 2012. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2012. Sumber: <http://dinkes.gorontalo.web.id/>
- Situmorang. 1998. *Pengawasan Melekat*. Artikel Online <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/pengawasan-melekat.html>
- Soetjipto, R Kery dan Prawoto Sudikdiono. 2011. *Akuntansi Pemerintah RI Reformasi Keuangan Negara*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sopannah dan Wahyudi. 2006. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Universitas Widya GamaMalang*.

Tanjung.Abdul Hafids. 2007. *Akuntansi Pemerintah Daerah Kosep Dan Aplikasi*. Alfabeta.Yogyakarta.

**Sukmana Dan Lia. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya). *Jurnal*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.**

Sugiono.2009. *Statistika Teori dan Aplikasi*. Cetakan Keduabelas. Alfabeta, Bandung.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R & D*. Alfabeta. Bandung.